



PROFIL EKOSISTEM

EKOSISTEM HUTAN SUMATERA  
DI DALAM  
“HOTSPOT” KEANEKARAGAMAN HAYATI  
SUNDALAND  
INDONESIA

VERSI TERAKHIR  
11 DESEMBER, 2001

# DAFTAR ISI

<b>PENDAHULUAN</b>	<b>3</b>
PROFIL EKOSISTEM	4
<b>LATAR BELAKANG</b>	<b>4</b>
PEMPRIORITASAN SUMATERA DI DALAM “HOTSPOT”	5
TINGKAT PERLINDUNGAN BAGI KEANEKARAGAMAN HAYATI	7
<b>SINOPSIS ANCAMAN</b>	<b>8</b>
DESENTRALISASI	9
PENEBAHAN KAYU YANG LEGAL DAN ILEGAL	10
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	10
PERDAGANGAN SATWA LIAR DAN PERBURUAN LIAR	10
KONSTRUKSI JALAN	10
PERTAMBANGAN	11
KONFLIK SIPIL	11
<b>SINOPSIS INVESTASI SAAT INI</b>	<b>11</b>
DONOR MULTILATERAL	12
BADAN-BADAN PEMERINTAH	13
ORGANISASI-ORGANISASI NONPEMERINTAH	14
<b>RUANG BAGI INVESTASI CEPF DI SUMATERA</b>	<b>17</b>
<b>STRATEGI INVESTASI DAN FOKUS PROGRAM CEPF</b>	<b>18</b>
MEMPERKUAT PENANGANAN SUMBER DAYA HUTAN PADA TINGKAT KABUPATEN DAN DI BAWAHNYA	19
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT SIPIL UNTUK BERORGANISASI MENDUKUNG KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI	20
MEMBANGUN ALIANSI ANTARA KELOMPOK-KELOMPOK MASYARAKAT SIPIL BERWAWASAN KONSERVASI DENGAN SEKTOR SWASTA	20
MENILAI DAMPAK INTERVENSI KONSERVASI PADA TINGKAT WILAYAH DAN DI BAWAHNYA	20
<b>KESINAMBUNGAN PROGRAM</b>	<b>20</b>
<b>RANGKUMAN</b>	<b>21</b>

## PENDAHULUAN

Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), atau Dana Kemitraan Ekosistem Kritis, dirancang untuk menjaga kelestarian pusat-pusat lokasi keanekaragaman hayati dunia yang terletak di negara-negara berkembang, dan yang telah terancam kelangsungannya. CEPF merupakan inisiatif gabungan dari Conservation International (CI), Global Environment Facility (GEF), Pemerintah Jepang, MacArthur Foundation dan Bank Dunia. CEPF memberikan pendanaan bagi proyek-proyek di pusat-pusat lokasi keanekaragaman hayati – yaitu kawasan yang mempunyai lebih dari 60 persen keanekaragaman spesies terestrial didalam wilayah seluas 1,4 persen dari luas permukaan bumi. Tujuan mendasar dari pendanaan ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat umum aktif terlibat dalam upaya-upaya perlindungan keanekaragaman hayati di lokasi-lokasi tersebut. Tujuan lainnya adalah untuk memastikan bahwa upaya-upaya tersebut akan melengkapi strategi-strategi yang ada serta kerangka-kerangka kerja yang telah dibuat oleh pemerintah, baik tingkat lokal, daerah, maupun nasional.

CEPF akan mendorong aliansi kerjasama antara kelompok-kelompok masyarakat, LSM, pemerintah, institusi akademik dan sektor swasta, menggabungkan kapasitas uniknya masing-masing serta menghilangkan duplikasi upaya, demi terbentuknya pendekatan yang lebih komprehensif terhadap daerah konservasi tersebut. CEPF bersifat unik diantara beragam mekanisme pendanaan, karena memfokuskan diri pada kawasan penting biologis dan bukan pada batasan-batasan politik, dengan sasaran untuk memaksimalkan kelangsungan keanekaragaman hayati melalui pembentukan portofolio proyek-proyek, yang kesemuanya sedapat mungkin memberi sumbangan pada sebuah program konservasi berskala-kawasan yang terpadu. CEPF juga akan fokus pada kerjasama lintas-batas, apabila kawasan yang kaya akan nilai-nilai biologis ternyata melampaui batas-batas negara, atau pada lokasi-lokasi dimana pendekatan daerah akan lebih efektif daripada pendekatan nasional. CEPF bertujuan untuk memberikan suatu mekanisme pendanaan yang tangkas dan fleksibel pada masyarakat sipil, melengkapi pendanaan yang saat ini telah tersedia bagi badan-badan pemerintah.

Salah satu tahapan pokok dalam pengembangan profil ekosistem untuk Sumatera ini adalah suatu rangkaian lokakarya multipihak, masing-masing berlangsung selama dua hari penuh. Konsultasi-konsultasi tersebut diselenggarakan di Sumatera bagian utara, tengah dan selatan, untuk saling membandingkan kondisi yang ada serta menganalisa zona-zona biogeografis utama di pulau itu. Satu lokakarya diselenggarakan oleh LSM internasional, satu oleh LSM nasional, dan yang ketiga oleh universitas tingkat propinsi. Pesertanya adalah gabungan dari LSM lokal yang sudah dikenal dan para pemimpin masyarakat, tapi juga mencakup wakil-wakil kalangan akademisi, DPRD, bupati, industri kehutanan, militer, dan badan-badan yang bertanggung jawab atas kawasan lindung. Proses ini juga menyertakan kegiatan lokakarya konsultasi bersama para pakar biologi dan pakar ekonomi selama tiga hari. Sekitar 223 orang telah dikonsultasikan dalam pengembangan profil ekosistem ini. Informasi yang dikumpulkan dari konsultasi dengan pihak-pihak terkait ini mengarah ke keputusan CEPF untuk memfokuskan dukungan pada tingkatan kabupaten dan yang di bawahnya. Kawasan prioritas secara geografis telah teridentifikasi oleh CEPF, berdasarkan tingkat ancaman tertinggi terhadap kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar, dan pada peluang-peluang yang ada untuk menciptakan kerjasama strategis dan untuk meningkatkan keberhasilan proyek serta program yang telah berjalan.

Sebagai rangkuman, CEPF menawarkan sebuah peluang untuk memajukan konservasi dari beberapa ekosistem paling penting di dunia – yaitu tempat-tempat yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan keindahan yang luar biasa. CEPF akan mendorong keterlibatan aktif dari publik dan institusi swasta dalam skala yang luas, untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan konservasi melalui upaya-upaya regional yang terpadu.

## **Profil Ekosistem**

Tujuan dari profil ekosistem ini adalah untuk memberikan sebuah ulasan tentang penyebab-rusakannya habitat keanekaragaman hayati di suatu kawasan tertentu, dan untuk menggabungkan analisa ini dengan inventarisasi aktivitas konservasi yang ada sekarang, agar dapat mengidentifikasi suatu peluang dimana investasi CEPF dapat memberi nilai tambah yang terbaik. Profil ekosistem ini dimaksudkan untuk merekomendasikan arahan pendanaan strategis secara luas, yang dapat diimplementasikan oleh masyarakat untuk berperan serta dalam konservasi keanekaragaman hayati di dalam daerah target. Para peminat akan mengajukan proyek-proyek spesifik yang konsisten dengan kriteria dan arahan luas ini. Profil ekosistem ini tidak menentukan kegiatan spesifik yang dapat diajukan oleh para pelaksana prospektif di daerah yang dimaksud, namun memberikan suatu garis besar strategi konservasi yang akan memandu aktivitas tersebut. Dengan alasan tersebut, bukan merupakan tugas bagi profil ekosistem ini untuk menjadi lebih spesifik tentang lokasi atau ruang lingkup proyek tertentu, atau untuk mengidentifikasi patokan-patokan yang cocok untuk aktivitas-aktivitas itu. Para peminat akan diminta untuk mempersiapkan proposal yang rinci, yang menjelaskan secara spesifik indikator-indikator kinerja mereka.

Sebagai rangkuman, profil ekosistem ini adalah strategi investasi lima tahun yang dimaksudkan untuk memandu pelaksanaan dana bantuan CEPF. Pihak pemberi dana bantuan dan pihak penerima dana akan menentukan intervensi spesifik yang didukung CEPF.

## **LATAR BELAKANG**

Hotspot Sundaland meliputi setengah bagian barat dari kepulauan Indonesia, yaitu suatu kelompok 17.000 pulau terhampar sepanjang 5.000 kilometer di katulistiwa dan terletak di antara benua Asia dan Australia. Hotspot ini mencakup beberapa pulau-pulau terbesar di dunia dan berbatasan dengan tiga hotspot lainnya: Wallacea di bagian timur, Indo-Burma di bagian barat, dan Filipina di bagian utara. Secara keseluruhan, keempat pusat lokasi ini merupakan satu dari dua konsentrasi terbesar keanekaragaman spesies darat dan air tawar di Bumi – sedangkan satu lagi terdapat di sebelah utara Amerika Selatan.

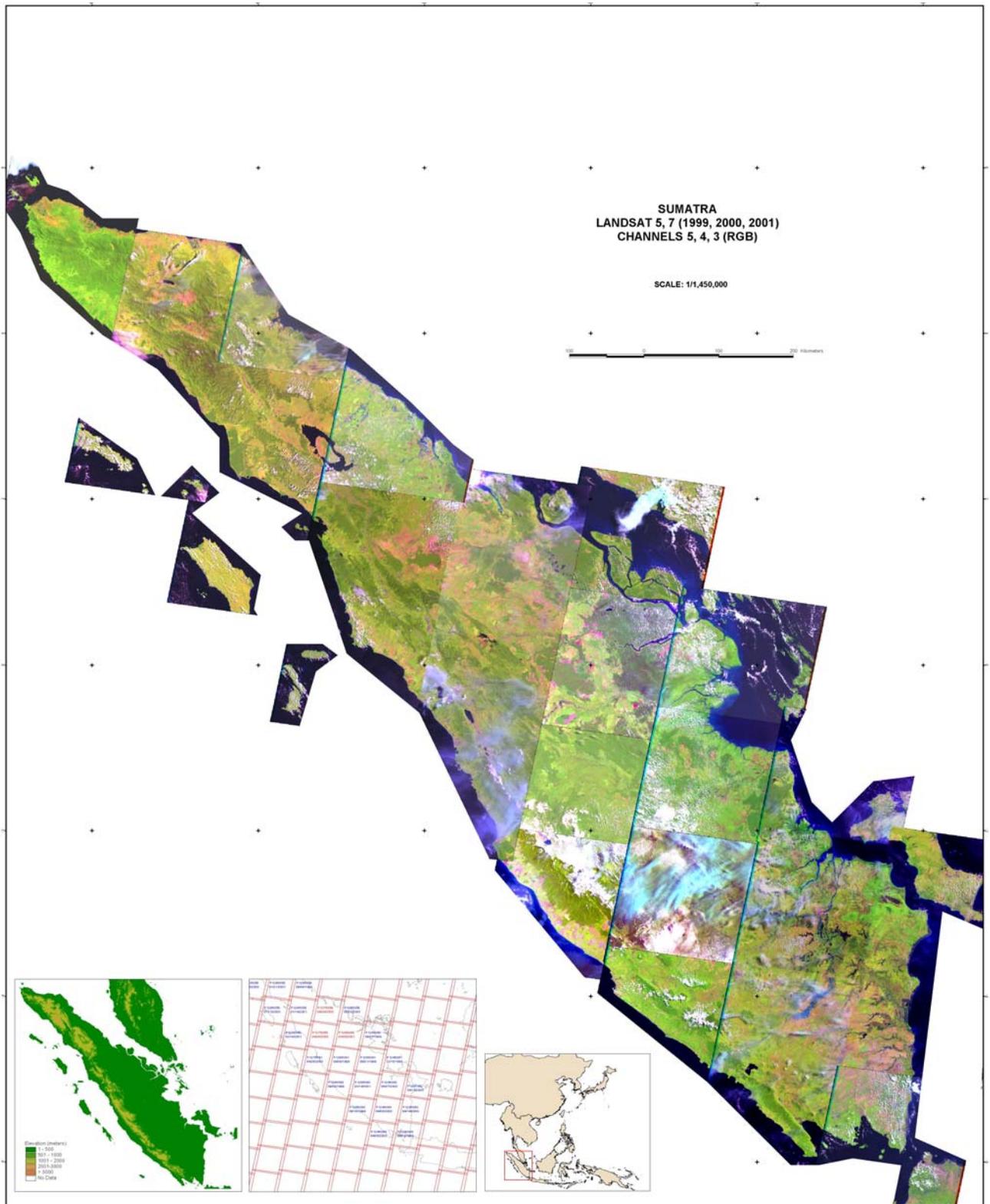
Sundaland memiliki luas sekitar 1,6 juta kilometer persegi, didominasi oleh pulau Kalimantan dan Sumatera. Topografinya mencakup pegunungan tinggi, pegunungan berapi, daratan endapan, danau, rawa, dan pesisir pantai yang dangkal. Indonesia sendiri merupakan rumah bagi 10% jumlah spesies tumbuhan dunia, 12% dari semua mamalia, 17% dari semua burung, 16% dari semua reptil dan amfibia, dan 25% dari semua jenis ikan. Sundaland mempunyai enam daerah burung endemis, bersamaan dengan 15.000 spesies tumbuhan endemis, 139 spesies burung endemis, 115 spesies mamalia endemis, 268 spesies reptil endemis, dan 280 spesies ikan air tawar endemis.

## **Pemprioritasan Sumatera di Dalam Hotspot**

Sumatera, yang berukuran panjang 1.800 kilometer dan lebar 400 kilometer, merupakan fokus dari investasi pertama CEPF di Sundaland, karena kawasan ini mungkin merupakan pusat lokasi yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tertinggi namun tingkat ancaman paling tinggi. Sumatera mempunyai jenis mamalia terbanyak (210 spesies) dibandingkan dengan semua pulau lain di Indonesia. Enam belas spesies mamalia tersebut bersifat endemis di Sumatera, dan sekitar 17 bersifat endemis di Kepulauan Mentawai di sebelahnya. Keanekaragaman primata endemis Sumatera per unit daerah merupakan yang tertinggi di seluruh dunia. Delapan jenis mamalia endemis Sumatera dan di Kepulauan Mentawai tercatat dalam *Red List of Threatened Species* (Daftar Merah Spesies yang Terancam) IUCN, dan di Lampiran Konvensi Perdagangan Internasional tentang Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/CITES).

Daftar burung Sumatera berjumlah 582 spesies, sekitar 465 daripadanya bersifat menetap dan 14 bersifat endemis, menjadikannya daerah biogeografis terkaya kedua di Indonesia dalam hal burung, setelah Papua. Menurut BirdLife International, terdapat 34 Kawasan Penting Burung (Important Bird Areas/IBA) di pulau Sumatera, 54% diantaranya berada di luar daerah yang diproyeksikan, dan 18% berada di hutan dataran rendah yang keadaannya terancam kritis. Dari 300 spesies reptil dan amfibia Sumatera, 69 (23%) bersifat endemis. Sistem perairan tawar Sumatera mengandung 270 spesies, 42 (15%) diantaranya bersifat endemis.

Sebagian besar spesies tumbuhan endemis Sumatera ditemukan di hutan-hutan dataran rendah yang berada di bawah 500 meter, meskipun sampai saat ini baru sekitar 15% dari keseluruhannya yang telah tercatat. Hutan primer Sumatera yang masih tersisa hanyalah kurang dari 40%. Tingkat penebangan hutan saat ini rata-rata sebesar 2,5% per tahun, dan yang terparah terjadi di daerah dataran rendah dan hutan-hutan perbukitan yang kaya akan spesies. Para ilmuwan memprediksikan bahwa semua hutan tropis dataran rendah Sumatera akan lenyap di tahun 2005.



## Tingkatan Perlindungan bagi Keanekaragaman Hayati

Indonesia, khususnya Sumatera, bukanlah kawasan baru dalam konsep konservasi. Malah sebenarnya, konservasi telah menjadi fokus perhatian yang cukup banyak sejak jaman penjajahan Belanda. Pada tahun 1997, pada saat krisis ekonomi Indonesia, pemerintah mengeluarkan dana antara \$22 juta sampai \$33 juta per tahun untuk kawasan lindung, sekitar 20% berasal dari donor internasional.

Sampai saat ini, Pemerintah Indonesia telah menetapkan 73 daerah konservasi di Sumatera (lihat Tabel 1 dan Gambar 1). Namun, kawasan lindung saat ini pun masih belum aman, dan banyak, bahkan sebagian besar, telah kehilangan hutan mereka akibat tekanan yang terus-menerus.

**Tabel 1: Kawasan terlindungi di Sumatera**

DAERAH KONSERVASI	NO.	HEKTAR
Cagar Alam	30	47.190
Suaka Margasatwa	14	628.657
Taman Buru	5	129.650
Taman Hutan Raya	5	81.386
Taman Nasional	7	3.430.390
Taman Rekreasi	10	20.376
Taman Rekreasi Laut	2	230.100
Total	73	4.567.749

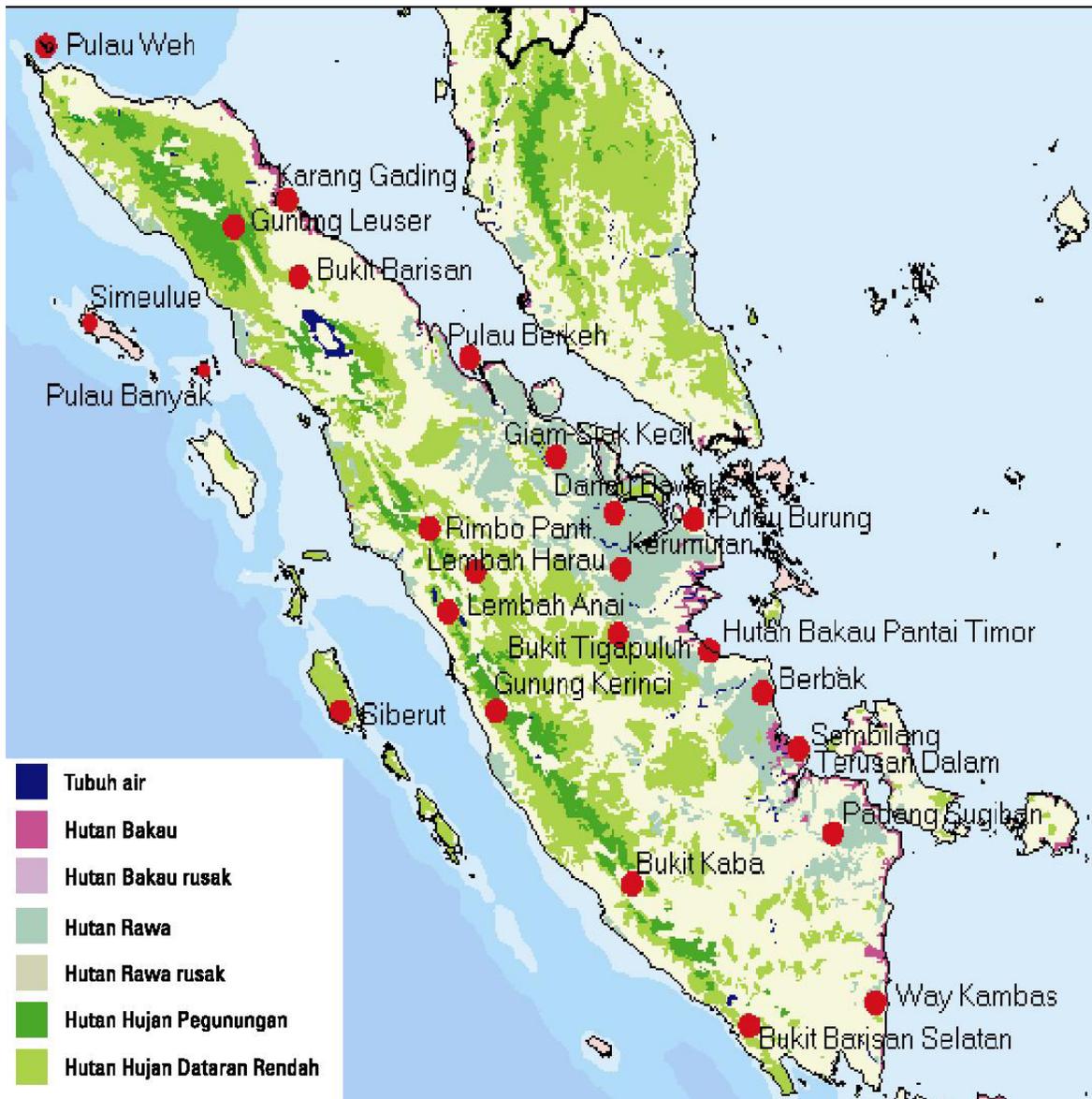
Sumber: Data Statistik PKA, 1999

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) di bawah Departemen Kehutanan bertanggung jawab atas kawasan yang lindung. Namun, manajemen kawasan lindung yang di lapangan – termasuk hutan penyangga, hutan produksi, dan taman-taman – kini berpindah ke tingkat kabupaten. Selain ketidakjelasan tanggung jawab yang saat ini terjadi, pemerintah lokal mempunyai masalah tentang cara meningkatkan pendapatan mereka dari dalam wilayah mereka sendiri. Hal ini menciptakan ketegangan antara pemerintah lokal dan petugas konservasi, karena kawasan lindung meliputi lahan-lahan yang tidak dapat dikenakan pajak tanah. Sampai saat ini, ekoturisme di taman-taman nasional belum memberi pemasukan yang memadai untuk dapat mengimbangi kerugian dari sektor pajak. Sebagian besar LSM Indonesia yang diwawancarai untuk profil ekosistem ini yakin bahwa keberhasilan konservasi terutama akan ditentukan oleh sikap dan tindakan yang dilakukan pada tingkat kabupaten, tanpa mengecualikan peraturan nasional yang berlaku.

Pelanggaran batas ke dalam kawasan lindung menjadikan upaya perbaikan dan pelestarian koridor-koridor hutan menjadi semakin sulit. Kawasan lindung itu sendiri menghadapi sejumlah masalah manajemen, antara lain:

- kurangnya kemauan politik;
- korupsi dan suap;
- moralitas staf yang rendah dan kurangnya insentif untuk kinerja yang baik;
- terbatasnya kapasitas untuk konservasi sumber daya dan penegakan hukum;
- dana yang tidak memadai; dan,
- penentangan dari sektor swasta dan masyarakat umum.

Pada bulan September 2001, pemerintah memperbarui komitmen untuk menghentikan penebangan hutan ilegal, khususnya yang beroperasi dalam taman-taman nasional. Namun sayangnya, penebangan hutan ilegal dan korupsi yang merajalela masih terus saja terjadi.



Gambar 1: Kawasan Lindung di Sumatera

## SINOPSIS ANCAMAN

Keadaan kawasan lindung yang terus memburuk dan cepatnya kerusakan hutan dataran rendah merupakan ancaman umum terhadap keanekaragaman hayati Sumatera yang nampak nyata. Sebelum membicarakan ancaman-ancaman pokok lainnya, penting untuk mempertimbangkan penyebab-penyebab utamanya:

- **Kurangnya kemauan politik.** Meskipun deklarasi-deklarasi di tingkat nasional telah mengarah pada penghentian pengrusakan hutan yang ilegal dan perdagangan satwa liar yang ilegal, hanya ada sedikit kemauan politik atau perhatian yang terorganisir baik untuk melakukan hal yang sama pada tingkat lokal.

- **Kemiskinan.** Di tahun setelah krisis ekonomi 1997, standar hidup bagi 15 juta lebih orang Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Di tahun 1999, 18,2% hidup dalam kemiskinan. Pada awal 2001, GDP per kapita adalah \$2,685.
- **Korupsi, kolusi dan nepotisme.** Penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi merupakan warisan yang telah merajalela dan banyak didokumentasikan sejak jaman Suharto. Keterlibatan militer dalam pengrusakan sumber-sumber daya hutan juga merupakan peninggalan jaman itu.
- **Penegakan hukum yang tidak berfungsi.** Tiadanya penegakan hukum, khususnya dalam sektor kehutanan, telah umum diketahui, bahkan dalam pernyataan-pernyataan resmi oleh Menteri Kehutanan Indonesia.
- **Dorongan kuat terhadap pembabatan dan perubahan fungsi hutan.** Keuntungan dari industri minyak kelapa sawit dan kebangkrutan industri kertas dan bubur kertas, mendorong terjadinya pembabatan, pembakaran dan perubahan fungsi hutan dalam skala besar. Sementara, proses pembalakan dan perubahan fungsi tersebut memberikan mata pencaharian bagi masyarakat lokal, yang meskipun tidak sah namun sangat dibutuhkan.
- **Dorongan terhadap upaya konservasi tidak memadai.** Nilai dari layanan-layanan ekologis (misalnya pengendalian banjir, fungsi-fungsi aliran air, dan pemanfaatan hasil-hasil hutan yang diatur dengan baik) tidaklah dipahami dengan baik, sementara hukuman terhadap pembabatan hutan yang ilegal kurang memadai.

## **Desentralisasi**

Undang-undang yang mengharuskan dibentuknya otonomi daerah, yang berlaku sejak Januari 2001, secara fundamental akan menyusun ulang bentuk hubungan antara pemerintah pusat di Jakarta dan otoritas lokal dalam semua sektor, termasuk sektor kehutanan. Saat ini, terdapat 78 badan pengambil keputusan tingkat lokal di Sumatera. Otoritas propinsi dan daerah menjadi semakin menolak inisiatif-inisiatif gaya lama yang diatur dari pusat. Pada saat yang bersamaan, pemerintah pusat tetap bertanggung jawab atas kawasan yang dilindungi. Dalam banyak kasus, hal ini menjadikan lumpuhnya manajemen kawasan lindung.

Meskipun terjadi ketidakpastian soal kekuasaan hukum di daerah lindung antara pemerintah pusat dan otoritas tingkat daerah, kecenderungan desentralisasi membuka pintu terhadap peningkatan partisipasi lokal dalam hal alokasi dan manajemen sumber-sumber daya alam dan peningkatan tanggung jawab pemerintah di tingkat lokal. Namun, jika tidak dilaksanakan dengan baik, desentralisasi juga menaruh risiko besar terjadinya percepatan kerusakan lingkungan.

## **Penebangan Kayu Legal dan Ilegal**

Pemanfaatan hasil hutan baik kayu maupun non-kayu yang tidak sah dan ilegal terjadi merajalela di seluruh Sumatera, terkadang mendapat dukungan dari militer, polisi, serta industri-industri perkebunan, kertas dan bubur kertas. Harga kayu ilegal jauh lebih rendah dari kayu legal, sehingga operasi yang legal tidak mendapat keuntungan ekonomis. Situasi ini diperburuk oleh meningkatnya permintaan kayu dari Cina, sebagai akibat adanya larangan penebangan kayu di negara tersebut. Kayu ilegal dari Sumatera diselundupkan melalui Malaysia untuk memenuhi permintaan dari Cina, Amerika Utara, Eropa, dan Jepang.

Industri kertas dan bubur kertas merupakan faktor utama ancaman yang terjadi akibat penebangan kayu. Indah Kiat, salah satu perusahaan kertas dan bubur kertas terbesar di Sumatera, menggunakan 6,8 juta meter kubik bubur kayu di tahun 1999, sekitar 87% diproses dari kayu yang diambil dari hutan dan bukan dari perkebunannya sendiri. Situasi perusahaan ini mirip dengan operasi kertas dan bubur kertas lainnya di Sumatera, dimana kebutuhan kolektif akan kayu kira-kira delapan kali persediaan dari perkebunan. Selain itu, hutang raksasa dan kebangkrutan mendorong perusahaan-perusahaan kertas dan bubur kertas untuk memabat hutan dataran rendah dengan kecepatan yang lebih besar daripada sebelumnya.

## **Perkebunan Kelapa Sawit**

Di Propinsi Jambi, pemerintah daerah mempromosikan ekspansi dari perkebunan kelapa sawit. Gubernur propinsi ini telah mengumumkan rencana untuk mengubah 1 juta hektar hutan menjadi kelapa sawit sampai tahun 2005. Situasi di Jambi ini mencerminkan besarnya rencana ekspansi kelapa sawit yang akan dilaksanakan di tempat lain, setidaknya di Propinsi Riau dan di Sumatera utara.

Pada saat yang bersamaan, kebakaran hutan banyak terjadi di seluruh Sumatera, khususnya di wilayah tengah dan selatan. Dengan meningkatnya harga minyak kelapa sawit, para pembangun perkebunan yang haus akan tanah di Sumatera dengan sengaja membakar hutan dengan skala wilayah yang luas. Di tahun 90-an, kontraktor perkebunan dan pembebasan tanah menggunakan api sebagai mekanisme utama untuk membuka lahan.

## **Perdagangan Satwa dan Perburuan Liar**

Perdagangan satwa dan perburuan liar terjadi merajalela di Sumatera. Insentif keuangan untuk perburuan gelap sangat tinggi, sementara kesadaran dan penegakan hukum atas peraturan perdagangan satwa liar masih rendah. Para politisi lokal dan pejabat militer dilaporkan terlibat dalam perburuan ilegal, dan satu pejabat militer telah ditangkap dan dijatuhi hukuman di Taman Nasional Way Kambas karena melakukan perburuan macan dan penjualan kulitnya secara ilegal.

## **Konstruksi Jalan**

Jalan merupakan rute dimana para penduduk dan truk-truk penebangan ilegal mendapat akses ke kawasan hutan yang dahulu terpencil, beserta semua spesies yang hidup di dalamnya. Jalan-jalan untuk penebangan hutan ini seringkali menjadi rute transportasi resmi yang diadopsi oleh pemerintah lokal. Di sebagian besar wilayah Sumatera, pembangunan jalan untuk penebangan ini menandai tahap pertama hilangnya hutan secara keseluruhan. Pemerintah lokal nampaknya

cenderung untuk mengakomodasi konstruksi jalan sebagai suatu bentuk mendapatkan penghasilan.

Gambar dari satelit mencatat ratusan jalan-jalan untuk penebangan melintasi jauh sampai ke dalam hutan-hutan lindung dan taman-taman nasional. Propinsi Aceh mempunyai rencana untuk membangun sistem jalan masuk, mulai dari Banda Aceh selatan sampai ke batas Ekosistem Leuser. Baru-baru ini, sebuah jalan telah dibangun di Taman Nasional Kerinci Seblat, meskipun ada peraturan yang melarangnya. Secara umum, pola pembangunan jalan menunjukkan bahwa fragmentasi hutan yang lebih besar akan terjadi dalam waktu dekat.

## **Pertambangan**

Ledakan bisnis pertambangan yang disokong oleh rejim Suharto dimulai pada tahun 90-an, telah menyebabkan pembangunan jalan di daerah yang dahulu terisolasi, pengrusakan hutan, banjir, dan polusi sungai. Sebuah LSM Sumatera telah meminta penutupan operasi pertambangan emas dan perak di Sumatera Selatan karena mengakibatkan kontaminasi di sistem sungai sekitar, hilangnya sumber-sumber daya air untuk penduduk desa sekitar, serta masih banyak kekhawatiran lainnya.

## **Konflik Sipil**

Suasana umum yang ada, yaitu ketidakpastian dan transfer otoritas ke pemerintah lokal, telah mengarah ke jatuhnya aturan hukum. Pertentangan lama di antara kelompok-kelompok etnis, kelas sosial, dan pekerjaan (misalnya petani dan polisi taman nasional), melemahkan efektivitas manajemen kawasan lindung. Konflik sipil di sebelah utara Sumatera, kekacauan hukum secara umum, serta ketegangan etnis atau agama di kawasan lain di pulau itu menyebabkan ancaman yang laten dan terus menerus. Perang sipil di Propinsi Aceh sebenarnya malah menguntungkan konservasi hutan pada saat ini, karena operasi perkayuan dan penebangan terhenti dengan alasan keamanan. Namun sayangnya, para pemberontak dilaporkan mengambil hasil-hasil hutan untuk membiayai pemberontakan mereka. Lingkup dari aktivitas ini tidak diketahui. Di sisi lain, perubahan dalam peraturan pemerintah diharapkan akan memberi kendali pada rakyat Aceh untuk mengatur sumber-sumber daya alam mereka sendiri – suatu perkembangan yang dapat menjadi peluang ataupun menjadi ancaman.

Faktor-faktor masyarakat sipil lain yang juga berpengaruh terhadap hilangnya keanekaragaman hayati antara lain persepsi publik bahwa taman-taman nasional Sumatera dibangun secara ilegal. Pandangan ini mempunyai pengaruh terhadap sejarah panjang konflik dengan otoritas konservasi. Dalam beberapa kasus, masyarakat lokal tetap bertahan dan menyatakan klaim mereka terhadap tanah yang ada di dalam kawasan lindung. Saat dihadapkan dengan kekerasan, tak mengherankan jika para otoritas taman nasional menyerahkan mandat konservasi mereka.

## **SINOPSIS INVESTASI KONSERVASI SAAT INI**

Jumlah dana untuk inisiatif-inisiatif konservasi di Sumatera pada tiga tahun ke depan diduga akan sedang-sedang saja, dan jelas akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun lalu. Berdasarkan wawancara dengan investor saat ini dan investor potensial, alasan-alasan terjadinya penurunan terutama adalah kurangnya kemauan politik yang mendukung konservasi, dan hanya ada sedikit keberhasilan yang dicapai dari jutaan dolar yang sudah diinvestasikan dalam proyek-proyek konservasi.

Selain pemerintah Indonesia, investor-investor utama di konservasi Sumatera adalah Uni Eropa, Global Environment Facility, United Nations Development Programme, dan Bank Dunia. Berikut ini adalah rangkuman dari para investor utama saja, untuk memberi suatu konteks terhadap investasi CEPF. LSM hanya terdaftar jika mereka menanamkan dana institusi mereka sendiri, dan bukan mengerjakan proyek di Sumatera dengan dana yang berasal dari investor lain.

## **Donor Multilateral**

**Bank Dunia (World Bank):** Proyek pengembangan dan konservasi terpadu (integrated conservation and development project/ICDP) Taman Nasional Kerinci Seblat adalah sebuah program enam tahun yang didanai oleh Bank Dunia, Global Environment Facility, dan pemerintah Indonesia, yang mencakup kontrak-kontrak besar ke Fauna Flora International (FFI), World Wide Fund For Nature (WWF), dan Conservation Information Forum. Bank Dunia telah menginvestasikan \$19,2 juta sebagai pinjaman untuk aktivitas pengembangan dan perencanaan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengamankan keanekaragaman hayati taman dan untuk menghentikan terjadinya fragmentasi habitat dengan cara menerapkan manajemen dan perlindungan taman, khususnya dengan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, mendorong manajemen keanekaragaman hayati taman yang berkesinambungan; dan mendukung tersedianya perlindungan hutan yang permanen, di kawasan konsesi zona penyangga yang masih ada.

**Global Environment Facility:** GEF menginvestasikan \$940,000 dalam proyek Hutan dan Media Konservasi Internasional (Conservation International's Forests and Media/INFORM). Proyek baru ini mempunyai tujuan utama memunculkan minat dan perhatian di kalangan masyarakat umum dan para pengambil keputusan penting, tentang masalah hilangnya keanekaragaman hayati hutan di sebelah barat Indonesia yang kini sudah kritis bahkan berpotensi tamat, serta mengarah ke gerakan menuju sistem manajemen hutan yang kuat untuk daerah tersebut.

ICDP Kerinci Seblat juga mengikutsertakan GEF, yang mendanakan \$15 juta dari total perkiraan anggaran total sebesar \$46 juta.

Konservasi Lahan Gajah di Aceh (Conservation of Elephant Landscapes in Aceh/CELA) dilaksanakan FFI dimana \$750,000 diinvestasikan oleh GEF. Tujuan utamanya adalah untuk melestarikan ekosistem-ekosistem hutan di Propinsi Aceh sebelah utara yang kaya secara biologis, fokus pada hutan-hutan dataran rendah yang merupakan koridor satwa liar penting khususnya bagi gajah, dan mempertahankan koridor-koridor biologis antara Ekosistem Gunung Leuser dan hutan-hutan di Aceh sebelah utara.

Proyek Konservasi Rawa Pantai Terpadu Berbak-Sembilang dan sekitarnya (Greater Berbak-Sembilang Integrated Coastal Wetlands Conservation Project) didanai oleh GEF dan dilaksanakan oleh Wetlands International. Proyek sebesar \$732,000 tersebut ditujukan untuk mempersiapkan dan melaksanakan sebuah rencana manajemen untuk Ekosistem Berbak-Sembilang dan Sekitarnya, berdasarkan pada nilai-nilai konservasi dan kebutuhan sosio-ekonomi, memperluas taman-taman nasional di dalam ekosistem, memperkuat manajemen taman nasional; dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dan LSM dalam hal manajemen taman dan konservasi keanekaragaman hayati.

**United Nations Development Programme:** Dengan dana sebesar \$800,000 selama tiga tahun dari UNDP-GEF, BirdLife International meneliti kebutuhan konservasi pada 34 daerah burung yang penting (Important Bird Areas) di Sumatera.

Program Bantuan Kecil (Small Grants Program) UNDP/GEF telah menginvestasikan \$1,5 juta di Indonesia, beberapa diantaranya pada daerah Sumatera. SGP menyediakan bantuan sampai \$50,000 dan bentuk-bentuk dukungan lain pada kelompok-kelompok dan LSM yang berbasis komunitas, yang menangani konservasi keanekaragaman hayati.

**European Union:** Program Pengembangan Gunung Leuser (Gunung Leuser Development Programme), dengan investasi EU sebesar \$29 juta dari tahun 1995-2002 ini didasarkan pada pemikiran bahwa jika ekosistem tersebut dilestarikan dengan baik, maka layanan-layanan ekologis yang muncul daripadanya dapat memberi manfaat yang berkesinambungan pada 3 juta penduduk manusia di sana.

Investasi EU di Proyek Manajemen Kebakaran Hutan Sumatera Selatan (South Sumatera Forest Fire Management Project/SSFFMP) akan berjumlah total sampai \$7,7 juta dalam lima tahun kedepan. Tujuan proyek ini adalah untuk membuat prosedur mekanisme berbasis desentralisasi agar terbentuk manajemen sumber daya hutan dan pulau Indonesia yang rasional dan bertahan lama.

**Asian Development Bank:** Pembangunan Kapasitas untuk Manajemen Desentralisasi Sumber Daya Alam (Capacity Building for Decentralized Natural Resources Management) dahulu bernama Kapasitas Manajemen Desentralisasi Sumber Daya (Decentralized Resource Management Capacity) merupakan proyek sebesar \$775,000 sebagai persiapan untuk membantu proses desentralisasi yang sedang berlangsung di Indonesia, dengan tujuan membangun kapasitas Badan Perencanaan Propinsi dan Daerah (BAPPEDA) untuk mengemban tanggungjawab baru mereka dalam hal perencanaan dan pelaksanaan manajemen sumber daya alam.

## **Badan-badan Pemerintah**

**Indonesia:** Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan EU untuk membiayai bersama Program Pengembangan Gunung Leuser, menyumbang \$16 juta dari Dana Reboisasi mereka. Pemerintah menambah \$13 juta sebagai dana pendamping investasi Bank Dunia dan GEF di ICDP Kerinci Seblat.

Melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, pemerintah akan mengalokasikan \$5,2 juta selama 12 bulan berikut untuk konservasi dan manajemen kawasan lindung di Sumatera. Menurut para ahli yang diwawancarai untuk profil ekosistem ini, jumlah tersebut adalah kira-kira 20% dari angka minimal yang dibutuhkan untuk terlaksananya manajemen dan pengembangan yang layak pada sistem kawasan lindung Sumatera.

**U.S. Agency for International Development:** USAID telah memberikan \$300,000 pada Conservation International untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap kemungkinan punahnya orangutan dan spesies endemis Sumatera lainnya di ekosistem Gunung Leuser. Proyek ini mencakup pembangunan kapasitas untuk taman dan personalia penegakan hukum yang relevan, serta membangun kekuatan inti pemantau lokal di dalam taman yang akan meningkatkan kemampuan penjaga taman untuk melindungi orangutan dan habitatnya.

**U.S. Fish and Wildlife Service:** Divisi Dana Konservasi Spesies Multinasional Konservasi Internasional USFWS (USFWS Division of International Conservation Multinational Species Conservation Funds) menginvestasikan sejumlah total \$368,570 dalam proyek-proyek di Sumatera, dengan sasaran pelestarian gajah, harimau, orangutan, dan owa.

## **Organisasi-organisasi Nonpemerintah**

**Conservation International:** Dasar-dasar kerja CI di Sumatera diletakkan pada awal 1990-an, dalam bentuk investasi kecil dalam bidang riset dan dukungan kepada LSM lokal di Pulau Siberut, untuk mengukur peluang-peluang pengembangan penghasilan alternatif bagi masyarakat yang berada di zona penyangga. Sejak itu, CI telah menginvestasikan lebih dari \$300,000 untuk berbagai proyek konservasi di Sumatera, termasuk analisa “Koridor Seulawah” di Aceh, dan sebuah studi kelayakan tentang pengimbangan karbon. (Proyek CI lainnya di Sumatera terdaftar di dalam GEF dan USAID di atas.)

**Save the Tiger Fund:** STF telah berinvestasi dalam inisiatif-inisiatif konservasi harimau di Sumatera sejak 1995. Sejak 2001, STF telah mendukung dua proyek berbasis lapangan di Sumatera, yaitu: dana bantuan sebesar \$195,700 untuk tahun keempat dari manajemen dan studi lapangan Wildlife Conservation Society untuk harimau di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Sumatera sebelah selatan, membantu merumuskan sebuah strategi pelestarian harimau di seluruh negeri, dan sebuah dana bantuan sebesar \$95,000 pada FFI untuk melatih para otoritas di Taman Nasional Kerinci Seblat mencegah perburuan harimau.

**Wildlife Conservation Society – Indonesia:** WCS telah berinvestasi dalam riset biologis di Indonesia selama lebih dari satu dekade, dan kini mempunyai sebuah kantor program di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dalam bentuk dana bantuan, institusi ini sekarang menginvestasikan \$300,000 per tahun di Sumatera bagian selatan, dengan peningkatan sebesar 20% per tahun. Subyek dari riset yang saat ini dilaksanakan di Bukit Barisan Selatan antara lain mamalia besar; efek kebakaran hutan pada tumbuh-tumbuhan dan satwa liar; ekologi dan konservasi orangutan, serta pelatihan terkait bagi ilmuwan-ilmuwan lokal; banyaknya hewan pemakan buah dan distribusinya di taman dan di seluruh Indonesia; ekologi dan tingkah laku siamang; dan seleksi serta pembagian habitat pada tupai. WCS juga melaksanakan sebuah program konservasi untuk gajah di Propinsi Lampung.

Program ini memperhatikan masalah konservasi dan penanganan keanekaragaman hayati Indonesia yang kaya, khususnya di Bukit Barisan Selatan. Beragam riset ekologinya dilengkapi dengan penelitian-penelitian sosio-ekologi, inisiatif-inisiatif peraturan, dan analisa data yang didapat dari penginderaan jauh. Dengan menggunakan gambar dari satelit dan GIS, para periset mendeteksi ancaman-ancaman yang ada pada Bukit Barisan Selatan, misalnya penebangan hutan dan pembebasan tanah, dan dampaknya terhadap satwa liar. Selain itu, WCS mempunyai rencana-rencana untuk membantu membangun kapasitas LSM lokal untuk menangani masalah sumber-sumber daya alam.

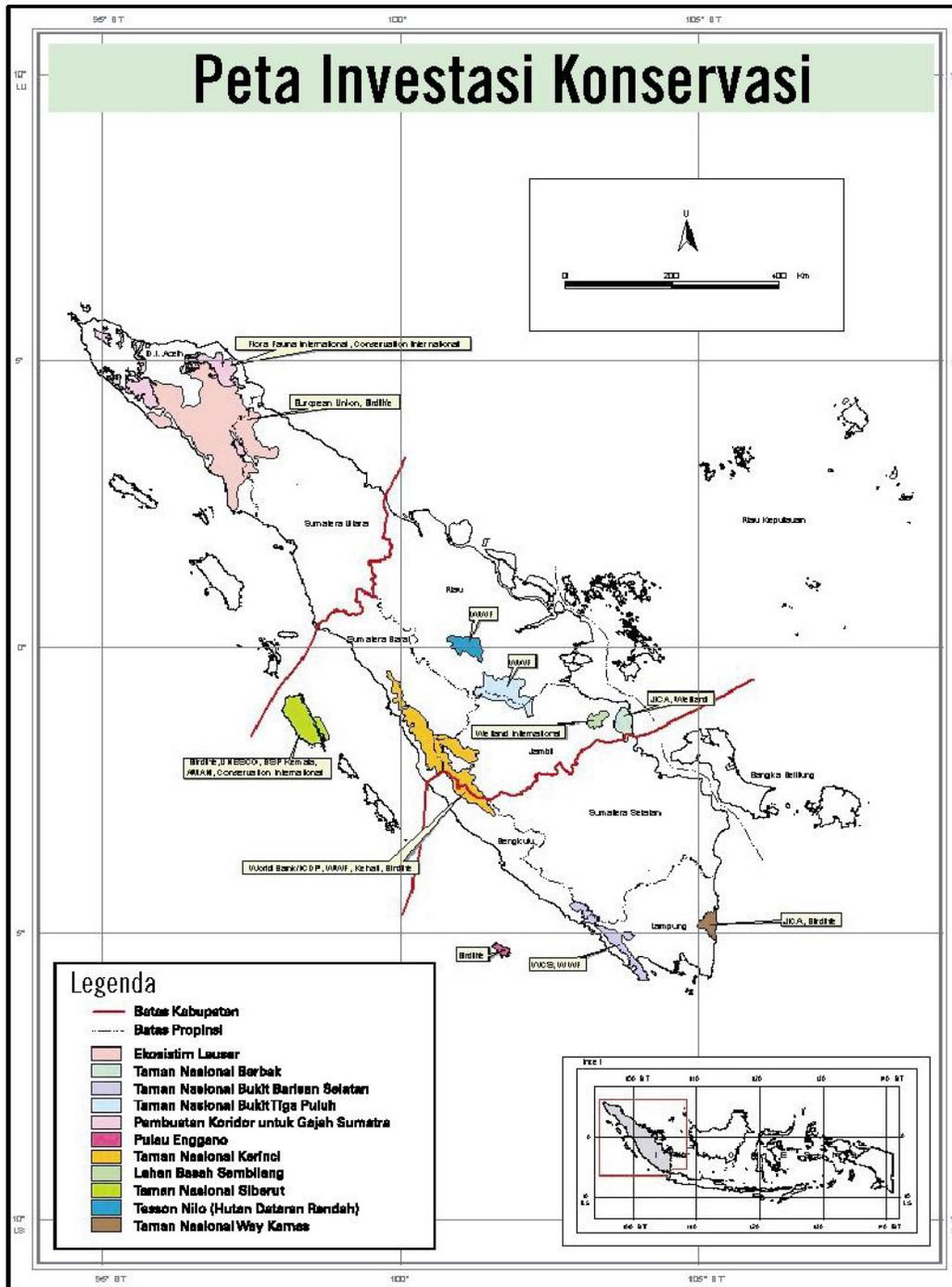
**World Wide Fund for Nature – Indonesia:** WWF – Indonesia telah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal PHKA di Taman Nasional Kerinci Seblat sejak 1990, untuk menjaga keanekaragaman hayati taman tersebut melalui sebuah sistem manajemen sumber daya yang berkesinambungan. Sejak 1996, WWF – Indonesia telah mendukung program konservasi

terpadu di Taman Nasional Bukit Tigapuluh dengan penekanan khusus pada harimau. Baru-baru ini telah dibentuk unit-unit anti-perburuan dan beroperasi di dalam kawasan lindung.

Di tahun 1998, WWF – Indonesia memulai sebuah proyek untuk menyediakan bantuan teknis jangka panjang pada pejabat otoritas yang relevan, untuk memperkuat pelaksanaan CITES dengan memantau spesies-spesies dan produk-produk yang diperdagangkan, serta memberi usulan kepada otoritas lokal dalam hal pelaksanaan peraturan-peraturan perdagangan. WWF – Indonesia mengembangkan sebuah panduan bagi polisi dan pejabat bea cukai untuk dapat mengenali produk-produk hasil dari spesies yang terancam punah. Pada saat yang bersamaan, sebuah kampanye edukasi sedang dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan peraturan-peraturan perdagangan satwa liar.

Sebagai bagian dari Strategi Aksi Badak dan Gajah Asia (Asian Rhino and Elephant Action Strategy/AREAS) dari WWF Internasional, WWF – Indonesia mensurvei populasi gajah, membantu dalam pengurangan konflik manusia & satwa liar, memantau perdagangan ilegal (melalui TRAFFIC) bagian-bagian tubuh badak dan gajah, dan melaksanakan upaya-upaya komunikasi dan penjangkauan masyarakat yang terkait. Di Sumatera, WWF dan pemerintah lokal mengajukan proposal untuk menjadikan kompleks hutan Tesso Nilo suaka margasatwa bagi gajah dan proyek demonstrasi untuk pengurangan terjadinya konflik manusia & gajah.

Setiap tahun, sejak 2000, WWF – US menginvestasikan kira-kira \$120,000 di Propinsi Riau untuk pekerjaan AREAS, \$50,000 untuk proyek harimau di Bukit Tigapuluh, serta \$125,000 untuk AREAS di Bukit Barisan Selatan.



Gambar 2: Investasi Konservasi di Sumatera

## **RUANG BAGI INVESTASI CEPF DI SUMATERA**

Celah yang ada pada investasi konservasi di Sumatera antara yang ada sekarang dan yang diproyeksikan tidak mesti bersifat programatik ataupun geografik. Kebanyakan “celah” tersebut sebenarnya merupakan akibat dari kurangnya keberhasilan konservasi, yang disebabkan karena tiadanya kemauan politik dan aturan hukum. CEPF akan menjadi investor yang lebih kecil, dibandingkan dengan pihak-pihak lain yang telah menghadapi hambatan tersebut di masa lalu. Namun, CEPF akan bermitra dengan para individu dan organisasi di lapangan, yang telah mempunyai keberhasilan konservasi yang biarpun kecil namun telah terbukti, dan menempatkan mereka “beriringan” dengan masyarakat sipil, dengan tujuan menstimulasi penanganan sumber-sumber daya hutan dengan cara yang spesifik pada tiap konteks lokal yang ada.

Konsultasi pada pihak-pihak terkait dalam menyusun profil ekosistem ini menekankan perlunya CEPF mendukung upaya-upaya masyarakat dan konservasi di tingkat kabupaten dan di bawahnya. Mereka juga mencatat bahwa sebuah tradisi untuk bekerja dalam isolasi telah menjadikan LSM Sumatera terkotak-kotak, dan oleh karena itu menjadi lemah dalam kaitan ancaman yang ada pada keanekaragaman hayati. Untungnya, LSM Sumatera sendiri menyadari kelemahan ini, dan ingin membentuk koalisi dan aliansi sehingga mereka dapat menangani masalah-masalah pokok dengan cara yang dapat menghindari terjadinya duplikasi kerja, mengambil manfaat dari kekuatan masing-masing organisasi, dan membangun pengaruh politik yang kolektif.

Berdasarkan rekomendasi-rekomendasi untuk memfokuskan dana pada tingkat lokal ini, sebagai dukungan untuk upaya-upaya konservasi yang terkoordinasi, CEPF akan mencari proyek-proyek di tingkat kabupaten dan di bawahnya, dengan tujuan memperkuat upaya penanganan lokal dalam hal hutan serta membangun aliansi antara para individu yang memperhatikan masalah konservasi, LSM dan kepentingan sektor swasta. Dengan melakukan itu, CEPF umumnya akan memberi dana bantuan berukuran kecil sampai menengah (\$50,000 atau kurang) kepada masyarakat sipil untuk proyek-proyek dan program-program yang mungkin tidak merupakan turunan dari investasi konservasi yang terdahulu. Pemberian dana dengan cara ini menuntut kerjasama dengan proyek-proyek serta program-program konservasi Sumatera yang baru dan yang telah ada sekarang.

Karena CEPF akan mengeluarkan jumlah uang yang relatif kecil selama jangka waktu lima tahun, yayasan Dana ini telah memilih sebuah ruang geografik sekaligus demografik tersendiri. Empat fokus daerah geografik dipilih berdasarkan pada: jumlah hutan dataran rendah yang kaya spesies yang masih tersisa; perkiraan waktu yang tersisa sebelum hutan tersebut punah; jumlah program konservasi berhasil yang ada saat ini; serta adanya potensi kerjasama konservasi. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, CEPF akan fokus pada kawasan berikut ini (didaftar mulai dari utara sampai selatan), dengan pengertian bahwa tingkat dukungan pendanaan akan bervariasi, sesuai dengan kapasitas serap dari mitra dan LSM lokal, iklim politik, penilaian keanekaragaman hayati, dan faktor-faktor penting lainnya yang kemungkinan dapat berubah selama jangka waktu investasi CEPF.

***Seulawah–Leuser–Angkola*** – Proses dengan pihak-pihak terkait untuk profil ekosistem ini, yang juga mencakup anggota-anggota gerakan kemerdekaan Aceh, menunjukkan adanya peluang untuk bekerjasama dengan mitra lokal untuk melestarikan wilayah yang luas, bahkan bisa berbentuk koridor, pada hutan dan *montane* dataran rendah yang relatif terjaga baik ini, yang

merupakan rumah bagi orangutan, gajah, badak dan harimau. Karena lokasi ini terdiri dari berbagai kepentingan politik dan agama yang sangat masif, upaya kemitraan menuju konservasi-koridor yang lebih luas akan membutuhkan waktu untuk dibentuk dan dikoordinasikan. Namun, sebagian karena sukarnya akses akibat dari konflik sipil yang terjadi, hutan-hutan ini mungkin dapat bertahan lebih lama dibandingkan dengan hutan lain di dataran rendah Sumatera bagian tengah dan selatan.

***Pulau Siberut*** – Kepulauan Mentawai yang bersebelahan dengan Sumatera sebenarnya mengandung lebih banyak mamalia endemik (17) daripada Sumatera secara keseluruhan (16). Pulau Siberut khususnya menjadi penting karena keanekaragaman hayatinya yang masih ada, tapi juga karena memiliki masyarakat sipil berwawasan konservasi yang telah aktif. Sejumlah dana pada Siberut kemungkinan besar dapat meningkatkan hasil-hasil konservasi secara nyata dan substantif.

***Teso Nilo–Bukit Tigapuluh*** – Dua daerah ini, hutan Teso Nilo dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, merupakan petak-petak lokasi hutan dataran rendah Sumatera terbesar yang masih ada, dan para ilmuwan memperkirakan akan punah pada tahun 2005 jika tidak ada intervensi konservasi yang berhasil. Survei menunjukkan bahwa kawasan ini merupakan rumah bagi harimau, gajah, beruang madu, dan beberapa spesies primata.

***Bukit Barisan Seletan*** – Taman nasional ini mempunyai sekitar 365.000 hektar hutan perbukitan dataran rendah yang masih utuh dan kaya akan spesies. Tidak seperti Teso Nilo - Bukit Tigapuluh, BBS mengalami tekanan penebangan hutan yang lebih sedikit, sehingga tingkat kerusakan hutannya lebih rendah. Ini terutama akibat dari pemukiman manusia yang melanggar masuk. Daerah ini dikenal karena harimau dan gajahnya, serta merupakan satu dari daerah populasi badak Sumatera terbesar yang masih ada.

Terakhir, dan mungkin yang terpenting, harus dicatat bahwa dukungan CEPF di Sumatera akan bersifat tangkas dan fleksibel, sesuai dengan iklim politik dan peluang konservasi yang ada.

## **STRATEGI INVESTASI DAN FOKUS PROGRAM CEPF**

Karena peraturan desentralisasi Indonesia, banyak peluang konservasi keanekaragaman hayati di Sumatera terletak pada tingkat kabupaten dan di bawahnya. Beberapa proyek konservasi di Indonesia telah menunjukkan harapan yang menjanjikan dalam hal pembangunan kapasitas masyarakat dan organisasi lokal untuk turut serta berpartisipasi serta menyokong konservasi sumber-sumber daya alam. Dengan alasan ini, ruang bagi CEPF khususnya akan terfokus pada pemberdayaan aktor-aktor penting pada tingkat lokal untuk berperan dalam penanganan hutan dengan kapasitas, koordinasi, kolaborasi, insentif, serta suara politik yang memadai.

Tabel di bawah ini merangkum arahan pendanaan strategis bagi CEPF di Sumatera.

ARAHAN STRATEJIK CEPF	PRIORITAS INVESTASI CEPF
<b>1. Memperkuat penanganan sumber daya hutan pada tingkat kabupaten dan di bawahnya</b>	1.1 Meningkatkan kesadaran akan nilai dari layanan-layanan ekologi 1.2 Meningkatkan kesadaran akan pilihan-pilihan yang ada dalam pemanfaatan konservasi hasil-hasil hutan dan layanan-layanan ekologi 1.3 Meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab untuk melestarikan keanekaragaman hayati 1.4 Membangun kapasitas untuk merencanakan dan melaksanakan manajemen sumber daya yang berdaya tahan dan berkesinambungan 1.5 Membangun kapasitas masyarakat sipil untuk memantau ekstraksi hutan
<b>2. Memberdayakan masyarakat sipil untuk berorganisasi mendukung konservasi keanekaragaman hayati</b>	2.1 Meningkatkan perwakilan dari masyarakat sipil dalam LSM 2.2 Membangun kapasitas kelompok masyarakat sipil untuk mengorganisasikan fungsi fungsi perlindungan sumber daya hutan 2.3 Mendukung aktivitas LSM yang menyarankan ekstraksi hutan yang legal dan berdaya tahan baik 2.4 Mendukung aktivitas LSM untuk menghentikan ekstraksi hutan yang ilegal
<b>3. Membangun aliansi antara kelompok-kelompok masyarakat sipil berwawasan konservasi dengan sektor swasta</b>	3.1 Membangun kapasitas diantara LSM untuk fasilitasi dan mediasi konflik 3.2 Mendukung kolaborasi dan kerjasama diantara LSM berwawasan konservasi 3.3 Mendukung mekanisme komunikasi yang mengaitkan LSM berwawasan konservasi satu sama lain dan dengan sektor swasta
<b>4. Menilai dampak intervensi konservasi pada tingkat kabupaten dan di bawahnya</b>	4.1 Membangun kapasitas masyarakat sipil untuk memetakan dan melacak aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi konservasi sumber daya alam dan perubahan yang terjadi dalam hal keanekaragaman hayati 4.2 Mendukung pemantauan periodik terhadap sikap masyarakat sipil terhadap konservasi keanekaragaman hayati pada daerah target 4.3 Mendukung analisa komprehensif terhadap data yang tersedia, dalam hal penggunaan lahan, kehadiran spesies, serta ancaman-ancaman konservasi

## Memperkuat penanganan sumber daya hutan pada tingkat kabupaten dan di bawahnya

Kegagalan konservasi di Sumatera telah menunjukkan bahwa masyarakat sipil pada tingkat kabupaten dan di bawahnya tidak menyadari nilai atau potensi manfaat dari pelestarian layanan-layanan ekologi dan sumber daya alam. Oleh karena itu, CEPF akan mendukung aktivitas-aktivitas yang akan mengikutsertakan apresiasi, minat, dan tindakan masyarakat sipil dalam menangani sumber-sumber daya hutan. Dalam kasus-kasus dimana masyarakat sipil telah menghargai sumber daya hutan, CEPF akan mendukung aktivitas-aktivitas yang membantu mereka mengerti seluruh pilihan untuk hidup dan mencari nafkah yang ada, dan bukan hanya melalui penebangan ilegal atau pembebasan hutan untuk dijadikan perkebunan. Dalam kasus-kasus lain, CEPF dapat mendukung upaya-upaya peningkatan kesadaran akan tanggungjawab terhadap penanganan hutan, sesuai dengan yang terdapat dalam nilai-nilai keluarga atau agama. Beberapa bagian dari masyarakat sipil mungkin telah menghargai dan menginginkan adanya pelestarian hutan, namun kurang pengetahuan tentang caranya. Dalam hal ini CEPF akan mendukung pengembangan pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai. Jika relevan, dana CEPF dapat melatih masyarakat sipil tentang cara inventarisasi sumber-sumber daya alam dan memantau hasil-hasilnya.

## **Memberdayakan masyarakat sipil untuk berorganisasi mendukung konservasi keanekaragaman hayati**

Jika peluang untuk manajemen sumber daya hutan berada pada tingkat kabupaten dan di bawahnya, maka masyarakat sipil lokal harus mengorganisasikan diri dan mengambil tindakan melawan pengambilan hasil-hasil hutan baik kayu maupun non-kayu yang merajalela dan seringkali ilegal. Berikutnya kalangan lokal yang berwawasan konservasi harus mempelajari dan saling berkomunikasi dengan individu-individu yang berwawasan sama, menyatukan upaya mereka dan menyusun kekuatan politik. Dalam beberapa kasus, CEPF akan mendukung pembentukan LSM baru, dan dalam hal lain CEPF akan mendukung pengembangan LSM yang ada. Setelah LSM yang berwawasan konservasi terbentuk, CEPF dapat mendukung mereka dalam berbagai jenis pembangunan kapasitas, termasuk komunikasi, pemahaman hukum yang relevan, pengorganisasian intervensi peraturan, perencanaan dan pelaksanaan sumber daya alam, pengukuran anti-perburuan, sistem inventarisasi hutan, dan metode-metode sensus satwa liar.

## **Membangun aliansi antara kelompok-kelompok masyarakat sipil berwawasan konservasi dengan sektor swasta**

Untuk mendapatkan pengaruh politik dalam menghadapi tekanan berat yang menentang konservasi sumber daya hutan di Sumatera, sangatlah penting bagi CEPF untuk mendukung para LSM menggabungkan upaya-upaya mereka dan membentuk aliansi. Karena sifat beraneka ragam yang ada dalam hal kebutuhan, prioritas geografi, latar belakang etnik, dan berbagai faktor lainnya, para LSM mungkin membutuhkan ketrampilan tertentu (misalnya, fasilitasi dan peredaa konflik) yang dibutuhkan untuk membentuk dan mempertahankan koalisi dan aliansi tersebut. Para anggota aliansi harus dapat mempunyai cara untuk saling berkomunikasi dengan teratur, dan untuk bersama-sama saat bertujuan mengkoordinasikan aktivitas atau pesan-pesan politik, dan untuk saling berbagi pelajaran yang didapat.

## **Menilai dampak intervensi konservasi pada tingkat kabupaten dan di bawahnya**

Mengingat cepatnya Sumatera kehilangan sumber-sumber daya alamnya, hanya ada sedikit waktu untuk masa percobaan dalam investasi konservasi. Oleh karena itu, adalah penting bila CEPF berinvestasi dalam mekanisme-mekanisme yang dibangun berdasarkan pada pelajaran-pelajaran yang telah didapat, namun juga harus mengevaluasi dengan cermat dan teratur tindakan-tindakan dan hasil-hasil konservasi. Mungkin diperlukan pula untuk mengembangkan skenario-skenario alternatif, sehingga bila aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan harus diubah dengan cepat, rencana darurat sudah tersedia. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah analisa komprehensif terhadap data yang tersedia untuk menilai penggunaan lahan, kehadiran spesies, dan ancaman-ancaman terhadap konservasi. Pada saat yang bersamaan, mensurvei sikap dari masyarakat sipil dalam interval waktu yang teratur menjadi penting untuk dapat memahami motivasi mereka dalam hal pemanfaatan sumber daya, melacak perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan berjalannya waktu, dan pengadaptasian upaya-upaya konservasi masa mendatang yang sesuai. (Penting untuk dicatat bahwa aktivitas-aktivitas ini berbeda dari program pemantauan dan evaluasi pada tiap dana bantuan.)

## **KESINAMBUNGAN PROGRAM**

Masuknya CEPF ke Sumatera di dalam lima tahun berikut akan memberi beberapa peluang bagi penggalangan dana. Para mitra pendanaan potensial antara lain MacArthur Foundation, Save the Tiger Fund, U.S. Fish and Wildlife Service, World Wildlife Fund, dan mungkin para investor dari sektor swasta, misalnya dari industri minyak dan gas bumi, kertas dan bubur kertas, serta minyak kelapa sawit.

Namun, kesinambungan dari upaya konservasi yang diluncurkan selama masa investasi lima tahun CEPF di Sumatera ini, akan sangat penting bagi konservasi jangka panjang keanekaragaman hayati di pulau tersebut. Atas alasan tersebut, CEPF haruslah berinvestasi dalam proyek-proyek yang secara jelas melibatkan dukungan dan partisipasi penuh dari orang-orang yang kesejahteraannya ekonomi dan penanganannya akan penting bagi berlanjutnya inisiatif-inisiatif konservasi yang berhasil. Selain itu, diperlukan sebuah mekanisme untuk pendanaan jangka panjang terhadap aktivitas-aktivitas tingkat kabupaten dan tingkat masyarakat untuk memastikan bahwa inisiatif-inisiatif konservasi tidak berhenti saat dana CEPF tidak lagi tersedia. Oleh karena itu, proyek-proyek yang terkait dengan semua pengarahannya strategik yang menuju ke pada penciptaan dana perwalian dan sumber-sumber dana berkesinambungan lainnya atau mekanisme-mekanisme alternatif yang memberikan daya tahan serta kesinambungan program harus mendapatkan prioritas.

## **RANGKUMAN**

Kebutuhan adanya konservasi keanekaragaman hayati di Sumatera mungkin merupakan salah satu hal yang paling mendesak di planet ini. Namun demikian, kebutuhan yang ada terlalu kompleks, bervariasi, dan luas jika hanya satu organisasi atau donor saja yang menanganinya secara penuh. Walaupun demikian, CEPF dapat menjadi katalis untuk konservasi keanekaragaman hayati dengan membangun kapasitas masyarakat sipil di tingkat lokal, untuk mendukung dan memantau peraturan-peraturan dan praktek-praktek manajemen sumber daya yang berdaya tahan dan berkesinambungan. Investasi CEPF akan mendorong kemauan politik terhadap penegakan aturan hukum, jika terjadi keprihatinan akan ekstraksi sumber daya dan konservasi. Untuk dapat mengisi peran ini, dibutuhkan kerjasama dengan para penerima bantuan yang hidup atau bekerja di antara masyarakat dan dapat diposisikan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi pelaksana jangka panjang yang efektif, pada kawasan hutan Sumatera yang paling kaya akan spesies.